

**KEJAYAAN HINGGA KEMEROSOTAN PANJI BULAN  
BINTANG: SEJARAH PARTAI MASYUMI DI  
SULAWESI SELATAN TAHUN 1950-AN**

*THE VICTORY TO THE DECLINE OF MOON STAR BANNER  
(PANJI BULAN BINTANG) OF MASYUMI PARTY JOURNEY  
IN SOUTH SULAWESI IN 1950S*

**TESIS**



**KHAERUL AMRI  
(F052221004)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
2024**

**KEJAYAAN HINGGA KEMEROSOTAN PANJI BULAN  
BINTANG: SEJARAH PARTAI MASYUMI DI SULAWESI  
SELATAN TAHUN 1950-AN**

TESIS

Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada  
Program Studi Sejarah  
Diajukan oleh:

**KHAERUL AMRI**  
**(F052221004)**

Kepada:

**FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**KEJAYAAN HINGGA KEMEROSOTAN PANJI BULAN BINTANG:  
SEJARAH PARTAI MASYUMI TAHUN 1950-AN DI SULAWESI  
SELATAN**  
*THE VICTORY TO THE DECLINE OF MOON STAR BANNER  
(PANJI BULAN BINTANG): OF MASYUMI PARTY JOURNEY IN  
SOUTH SULAWESI IN 1950S*

Disusun dan diajukan oleh:

**KHAERUL AMRI**  
**Nomor Pokok F052221004**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 11 Januari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

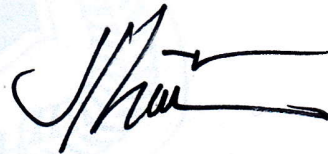
Menyetujui  
Komisi Penasehat

**Konsultan I**

**Konsultan II**



Amrullah Amir, S.S., M.A. Ph.D  
NIP. 19741016 200312 1 001



Dr. Ilham, S.S., M.Hum  
NIP.19760827 200801 1 001

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin**

**Ketua Pascasarjana Sejarah  
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akin Duli, M.A  
NIP. 19640716 199103 1 010



Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D  
NIP. 19741016 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : KHAERUL AMRI

NIM : F052221004

Program Studi : Magister Sejarah

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul: **KEJAYAAN HINGGA KEMEROSOTAN PANJI BULAN BINTANG: SEJARAH PARTAI MASYUMI DI SULAWESI SELATAN TAHUN 1950-AN**

Adalah karya ilmiah sendiri. Karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin. Penulisan karya ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Apabila dikemudian hari ternyata ada unsur plagiarism dan data tidak bisa dibuktikan dengan metode historiografi, saya bersedia menerima aturan sanksi yang berlaku.

Makassar, 11 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan



KHAERUL AMRI

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Kejayaan Hingga Kemerostan Panji Bulan Bintang: Perjalanan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan Tahun 1950-an”. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Magister Sejarah Universitas Hasanuddin Makassar.

Tesis ini kupersembahkan kepada almarhum Ayahku di pintu surga juga Ibuku yang setia mendoakan kesuksesanku. Rasa terima kasih yang tulus untuk seluruh saudara-saudaraku, Abd. Latief, Dahniar, Dinar serta Ahmad Mallakade yang senantiasa mendukung, memotivasi, memberikan arahan, serta perhatian yang tulus kepada penulis. Terkhusus kepada Bapak Jusuf Kalla, Prof. Nurdin Ablullah (Andalan memang) dan Prof. Yusril Ihza beserta pengurus PBB\_Bang Fery (Wamenaker), Bang Husni, Bang Jumhur serta Bang Lukman Hakiem Saifuddin terima kasih untuk bantuannya.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc (Rektor Universitas Hasanuddin).
2. Prof. Dr. Akin Duli, M.A (Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin).
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Amrullah Amir, M.A., Ph.D. dan Dr. Ilham, S.S., M. Hum selaku pembimbing.
4. Dr. Suriadi Mappangara, M. Hum. Dr. Muslimin A. R. Effendi, M. Hum, dan Dr. Nahdia Nur, M. Hum selaku penguji, serta dosen Program Magister Sejarah. Mereka adalah sosok penting yang layaknya orang tua penulis.
5. Seluruh Staff Pengajar Program Studi Magister Sejarah.


6. Para Pegawai dan Staff Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya, khususnya Pak Mullar.
7. Mahasiswa dan Alumni Program Magister Sejarah. Kak Sari, Ega, Nasra, Kak Adil, Maman, Nurul, dan Fajar. Bila nafasku lepas, semua langkahku hilang. Tapi bayangmu tetap kawan.
8. Terkhusus saudara tak sedarahku, kak Arfin beserta istri, kaka dewan Sainuddin beserta istri, Kak Edi, Kak Bahar, Marwan, Enceng, Aqqi.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan moril maupun materil kepada penulis.

Semoga bantuan yang telah diterima oleh penulis dari berbagai pihak, dapat balasan amal dari Allah SWT. Yang terakhir, penulis ingin sampaikan, semoga karya tulis ini dapat diterima dan menjadi referensi tambahan dalam pengembangan ilmu Ilmu Sejarah pada khususnya.

*Jazakumullahu Khaeran Katsiran. Fastabiqul Khaerat.*

*“Kupersembahkan kepada  
Kedua Orang Tuaku  
Sebagai Sembah Sujudku”*

Makassar, 4 Januari 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .....	15
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	17
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	18
1.4. Tinjauan Pustaka .....	19
1.5. Landasan Konseptual dan Pendekatan .....	30
1.6. Sumber Penulisan dan Metode Penelitian .....	38
1.7. Sistematis Pembahasan .....	43
<b>BAB II ISLAM, ORGANISASI ISLAM, PERJUANGAN ISLAM</b> <b>(Mata Rantai Sejarah Partai Masyumi).....</b>	<b>44</b>
2.1. Sejarah Terbentuknya Partai Masyumi .....	47
2.2. Perjuangan Masyumi Mengembalikan NKRI .....	57
2.3. Sulawesi Manjadi Bagian NKRI .....	77
<b>BAB III DEBUT DITENGAH KEMELUT: PARTAI MASYUMI</b> <b>DALAM MASA TRANSISI SULAWESI SELATAN .....</b>	<b>89</b>
3.1. Terbentuknya Masyumi di Sulawesi Selatan .....	92
3.2. Peta Kekuatan Politik Awal Sulawesi Selatan .....	103

3.3. Pemilihan DPRD Kota Besar Makassar .....	109
<b>BAB IV BERKUTAT, BERGULAT, BERDAULAT</b> <b>(Strategi Masyumi Menyongsong Pemilihan Umum) .....</b>	<b>114</b>
4.1. Restrukturisasi Partai Menyongsong Pemilu .....	116
4.2. Jaringan Ulama di Berbagai Daerah .....	119
4.3. Kolaborasi Masyumi-Muhammadiyah .....	122
4.4. Strategi Masyumi Terhadap Aturan Pelaksanaan Pemilu ...	125
4.5. Pertarungan Ideologi Dalam Masa Kampanye .....	138
<b>BAB V DAULAT TERLUKA PARTAI MASYUMI .....</b>	<b>153</b>
5.1. Dominasi Masyumi di Dapil XII .....	155
5.2. Konflik Politik Pasca Pemilu .....	163
5.3. Pembubaran Partai Masyumi .....	177
<b>BAB VI KESIMPULAN .....</b>	<b>185</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>189</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>200</b>



## DAFTAR SINGKATAN

Aneta	: Algemeen Nederlandsch Telegraaf Agentschap
ANIEM	: Algemene Nederlands-Indische Electriciteits Maatschappij
ANP	: Algemeen Nederlands Persbureau
AP	: Associated Press
APRA	: Angkatan Perang Ratu Adil
APRIS	: Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
BFO	: Bijzondere Federale Overleg
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CTN	: Corps Tjadangan Nasional
DCT	: Daftar Calon Tetap
DCS	: Daftar Calon Sementara
DI/TII	: Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia
DPD	: Dewan Pemerintahan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRS	: Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
GIM	: Gerakan Indonesia Merdeka
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
KGS	: Komando Grup Seberang
KGSS	: Kesatoean Gerilya Sulawesi Selatan
KLM	: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
KNIL	: Koninklijke Nederlands-Indische Leger
LISS	: Lembaga Indonesia Sulawesi Selatan
LIM	: Lembaga Indonesia Maluku
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
NICA	: Netherlands Indies Civil Administration

NIT	: Negara Indonesia Timur
NU	: Nahdlatul Ulama
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
PI	: Persbiro Indonesia
PIA	: Persbiro Indonesia Aneta
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKR	: Partai Kedaulatan Rakyat
PPI	: Panitia Pemilihan Indonesia
PPKab.	: Panitia Pemilihan Kabupaten
PPP	: Panitia Pendaftaran Pemilih
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PPS	: Penyelenggara Pemungutan Suara
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
SIAP	: Syarikat Islam Angkatan Pandu
RIS	: Republik Indonesia Serikat

## DAFTAR LAMPIRAN

1. AD/ART Partai Masyumi .....	206
2. SK Pengangkatan Soediro Sebagai Acting Gubernur Sulawesi .....	220
3. Fatwa Isa Ashari .....	221
4. Daftar Panitia Pemilihan Kabupaten Daerah Pemilihan XII .....	223
5. Daftar Calon Anggota DPR Masyumi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Dan Tenggara Pada Pemilu 1955 .....	226
6. Daftar Anggota DPR Yang Terpilih Pada Pemilu 1955 Di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Dan Tenggara .....	227

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 .....	131
2. Gambar 5.1 .....	169

## ABSTRAK

**KHAERUL AMRI.** Kejayaan Hingga Kemerostan Panji Bulan Bintang: Perjalanan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan Tahun 1950-an. (dibimbing oleh Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D dan Dr. Ilham, S.S., M.Hum).

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi sejarah perjalanan partai Masyumi di Sulawesi Selatan Tahun 1950-an. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi edukasi dan literatur tambahan untuk historiografi sejarah politik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan analisis sejarah deskriptif menggunakan perspektif kajian sejarah politik. Untuk mencapai sajian lembaran sejarah tersebut diperlukan analisis sejarah kritis yang sistematis meliputi sejumlah tahapan. Tahapan awal dimulai dengan hasil sintesa dan antitesa determinasi dinamika politik di masa lalu dengan cara berdialog dengan masa lalu melalui arsip dan Koran serta tulisan-tulisan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Masyumi di Sulawesi Selatan menjadi pembeda demokrasi. Sejak berdiri pada 1949, partai ini selalu menjadi partai pemenang dalam kontestasi politik dengan perolehan suara yang signifikan. Kedigdayaan partai dimulai dengan memenangkan pertarungan politik pada pemilihan anggota DPRD Kota Besar Makassar dilanjutkan dengan kemenangan pada pemilu 1955. Kedigdayaan partai dipengaruhi oleh struktur partai yang kuat, peran ulama, gerakan Muhammadiyah serta gerakan DI/TII besutan Kahar Muzakkar. Setelah berhasil menduduki mayoritas kursi Parlemen, partai ini sangat vokal dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga memicu konflik dengan Presiden Soekarno. Konflik yang berkepanjangan ini mengakibatkan pemerintah berupaya untuk mengubur panji politik Partai Masyumi. Partai ini berhasil dibekukan melalui Keppres 200 tahun 1960.

**Kata Kunci:** Politik, Islam, Partai Masyumi, Sulawesi Selatan

## ABSTRACT

**KHAERUL AMRI.** *The Victory to the Decline of Moon Star Banner (Panji Bulan Bintang): of Masyumi Party Journey in South Sulawesi in 1950s.* (Supervised by Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D., and Dr. Ilham, S.S., M.Hum.)

This research aims to reconstructing the history of the Masyumi party in South Sulawesi in 1950s. Moreover, this research is expected to provide the education and additional literature for the historiography of Indonesian political history.

The research used the descriptive historical analysis from the perspective of the political history studies. To achieve the presentation of these historical sheets, a systematic critical historical analysis was needed, including a number of stages. The initial stage began with the synthesis and antithesis of the determinations of the political dynamics in the past through the dialogues with the past through archives, newspapers, and relevant writings.

The research results indicated that the Masyumi Party in South Sulawesi became the differentiator of the democracy. Since its establishment in 1949, this party has always been the winning party in the political contests with significant vote acquisition. The party's power began by winning the political battle in the election of the members of the Makassar City Council, followed by the victory in 1955 election. The party's power was influenced by the strong party structure, the role of the "ulama" (religion scholars), Muhammadiyah movement, and Kahar Muzakkar's DI/TII movement. After gaining the majority of seats in Parliament, the party was very vocal in its policy-making, leading to conflict with President Soekarno. This prolonged conflict resulted in the government attempting to bury the political banner of the Masyumi Party. The party was successfully banned through Presidential Decree Number 200 Year 1960.

**Keywords:** Politics, Islam, Masyumi Party, South Sulawesi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Historiografi mengenai sejarah lokal di Indonesia masih banyak menyimpan obek kajian yang belum terungkap hingga sekarang. Penelitian sejarah lokal akan memperkaya khasanah sejarah nasional, juga memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika sosio-kultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Sejarah lokal biasanya menyangkut dinamika kepentingan kelompok masyarakat lokal yang ada didalamnya sehingga dapat dikatakan bahwa sejarah lokal mempunyai ruang lingkup yang terbatas dan biasanya dikaitkan dengan unsur wilayah. Sejarah lokal cenderung memiliki ruang lingkup wilayah yang relatif sempit, akan tetapi seringkali daerah yang sempit dan kecil lebih penting sejarahnya dibandingkan dengan daerah lain yang lebih luas.<sup>1</sup> Selain itu wilayah relatif sempit tersebutlah yang biasanya menjadi penopang yang baik kebersatuan dalam bernegara.

Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila negara tersebut memiliki suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah. Pemerintahan yang sah dan diakui juga merupakan elemen yang wajib ada. Pemerintahan ini setidaknya harus berdaulat serta diberi kekuasaan

---

<sup>1</sup> Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. 1985), hlm. 18.

atas kehendak rakyatnya.<sup>2</sup> Prinsip normatif mengenai konsep bernegara adalah dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan sehingga dapat saling mengimbangi satu sama lain.<sup>3</sup>

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, sehingga warga negara setidaknya turut berpartisipasi dalam pengelolaan negara melalui partai politik.<sup>4</sup> Salah satu partai politik yang lahir sebagai pemersatu umat Islam pada awal kemerdekaan adalah Partai Masyumi. Adanya keinginan bersama dikalangan umat Islam untuk membentuk partai politik Islam mendapat legitimasi setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang berisi anjuran untuk mendirikan partai politik. Empat hari setelah keluarnya Maklumat tersebut, diadakanlah Mukhtamar Umat Islam pada tanggal 7 dan 8 Nopember 1945 bertempat di Gedung Muallimin Yogyakarta yang diadakan oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia.<sup>5</sup>

Mukhtamar tersebut memutuskan beberapa hal. *Pertama*, Masyumi

---

<sup>2</sup> Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 78.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 152.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>5</sup> *Harian Kedaulatan Rakyat*, edisi 6 Nopember 1945.



merupakan partai politik Islam. *Kedua*, Masyumi merupakan satu-satunya partai politik di kalangan umat Islam. *Ketiga*, memperkuat persiapan umat Islam untuk *berjihad fi sabilillah* dalam melawan segala bentuk penjajahan. *Keempat*, memperkuat pertahanan Negara Indonesia dengan menyusun Barisan Sabilillah di daerah-daerah. *Kelima*, memilih Dr. Soekiman sebagai ketua, dan wakil ketua masing masing Abikusno dan Wali al Fatah. Ketiga orang itu diberi mandat untuk menyusun kepengurusan Masyumi.<sup>6</sup>

Pembentukan partai Masyumi sebagai upaya untuk menyatukan golongan-golongan Islam ke dalam satu partai politik yang kuat. Keputusan membentuk Partai Masyumi oleh sejumlah tokoh Islam itu, tidak sekedar sebagai keputusan tokoh-tokoh tersebut, tetapi keputusan dari seluruh umat Islam melalui utusan wakil-wakil mereka.<sup>7</sup> Kehadiran partai Masyumi sebagai pemersatu umat Islam, merupakan resolusi Partai Masyumi dalam menghadapi segala bentuk penjajahan, terutama menghadapi sekutu yang masuk ke Indonesia setelah kemerdekaan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Harian Kedaulatan Rakyat*, edisi 9 Nopember 1945.

<sup>7</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-I-Islami (Pakistan)* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 64-65.

<sup>8</sup> Kementerian Penerangan R.I., *Kepartaian di Indonesia*, 1951, hlm. 15.

Sebelum Masyumi tumbuh dan berkembang di Provinsi Sulawesi, daerah ini merupakan bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT). Menurut Makkelo, Sulawesi Selatan dan sebagian besar daerah di Indonesia bagian timur berada dalam suatu persimpangan.<sup>9</sup> Secara hukum menjadi wilayah Republik Indonesia (RI), tetapi secara administrasi pemerintahan ditingkat bawah sama sekali belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut terjadi karena Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (*Netherlands Indies Civil Administration*), juga membentuk kembali suatu pemerintahan dengan menghimpun pemimpin lokal di Indonesia Bagian Timur.<sup>10</sup> Hingga akhirnya berhasil mendeklarasikan Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 24 Desember 1946 menjadikan Makassar sebagai Ibukota Negara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat Ilham Daeng Makkelo, "Penataan Kota Masyarakat Perkotaan: Makassar Sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950". *SASDAYA, Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 2, No. 1, Yogyakarta: November 2017, hlm. 315.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Menurut Makkelo, NIT terbentuk atas kepiawaian H.J. van Mook, wakil pemerintah Belanda di Indonesia merancang strategi politik untuk memulihkan kembali kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial di wilayah bekas jajahannya (Hindia Belanda). Gagasan itu secara resmi dibicarakan dalam konferensi Malino pada bulan Juli 1946. Gagasan itu menjadi kenyataan ditandai dengan terbentuknya Negara Indonesia Timur. Lihat juga Ide Anak Agung Gde Agung, 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Republik Indonesia Serikat*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 144 dan 167.

Negara federal ini tidak berlangsung lama. Maraknya tuntutan agar NIT dibubarkan mengakibatkan suhu politik semakin meningkat di Sulawesi Selatan bahkan tampaknya sudah tidak terkendali. Demonstrasi besar-besaran terjadi dimana-mana hingga ke pedalaman, seperti Maros, Pankadjene dan Djongala didekat Makassar, orang terus mengadakan demonstrasi.<sup>12</sup>

Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraanya dalam rangka menyambut peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang kelima, mengumumkan pembubaran RIS dan menyatakan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sulawesi Selatan secara tidak langsung juga menjadi bagian dari NKRI tetapi statusnya tidak menjadi daerah otonom sebagaimana yang dikehendaki rakyatnya, melainkan hanyalah bagian dari Provinsi Sulawesi.<sup>13</sup>

Setelah Provinsi Sulawesi menjadi bagian dari NKRI, berbagai macam dinamika dan intrik politik yang terjadi mulai dari awal pembentuknya. Organisasi lokal dan partai politik mengambil peran

---

<sup>12</sup> *De vrije pers ochtendbulletin: "Demonstraties in Oost-Indonesie"*, edisi 5 April 1950, hlm. 2.

<sup>13</sup> Muhammad Amir, "Dari Federalis ke Unitaris: Studi Kasus Sulawesi Selatan 1945-1950", Bandung: *Patanjala*, Vol. 2, No. 2, Juni 2010, hlm. 356-357.

penting terhadap masalah ini. Hampir setiap pengambilan keputusan penting dalam sejarah panjang Provinsi Sulawesi, yang kemudian terpecah menjadi beberapa provinsi terdapat peran penting partai didalamnya.

Pada dasarnya, partai politik membentuk landasan masyarakat demokratis. Partai politik mengumpulkan kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam bentuk pilihan kebijakan dan memberikan struktur untuk berpartisipasi dalam politik.<sup>14</sup> Sebagai “republik baru”, pemangku kebijakan melalui pemerintah pusat pada awal tahun 1950-an gagal dalam melaksanakan desentralisasi kekuasaan melalui jalan demokrasi. Penunjukan kepala daerah dan anggota dewan perwakilan daerah seringkali dikondisikan oleh afiliasi partai dan berjalan mengimbangi preferensi lokal sehingga menambah ketidakpuasan di luar Ibu Kota untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.<sup>15</sup>

Percaturan politik partai Masyumi di Sulawesi Selatan dimulai sejak H. Mochtar Lutfi, seorang konglomerat yang masyhur memutuskan untuk bergabung dengan Partai Masyumi. Partai Masyumi di Sulawesi

---

<sup>14</sup> Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor. *Partai Politik dan Demokrasi Dalam Perspektif Teoritis dan Praktis Kelompok Parlemen*. (Washington DC: National Democratic Institute, 2001), hlm. 3.

<sup>15</sup> W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial* (terj.) Misbah Zulfah Ellizabet. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), hlm. 267-268.

Selatan berdiri pada 12 Oktober 1949 yang diketuai oleh M. Noer serta memiliki setidaknya 53 cabang.<sup>16</sup> Bagi Masyumi, hal ini tentunya menambah basis kekuatan politiknya menjelang pemilu 1955. Sampai 31 Desember 1950 tercatat 237 cabang, 1080 anak cabang, 4982 ranting, dan anggotanya berjumlah lebih kurang 10.000.000 orang,<sup>17</sup> sehingga Partai Masyumi dapat dikatakan sebagai partai politik terbesar di Indonesia pada masa itu.<sup>18</sup>

Sejak Partai Masyumi berikrar memperjuangkan panji-panji politiknya di Sulawesi Selatan, partai ini selalu menjadi partai terdepan dalam memenangkan persaingan. Hal ini dapat kita lihat melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Besar Makassar yang diadakan pada hari Rabu 6 Februari 1952. Pemilihan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan rasio partai dan organisasi di Makassar. Dari 25 kursi yang diperebutkan, 7 diraih oleh Masyumi, 2 oleh Parkindo, 2 Partai Katholik dan 1 oleh PSSI sehingga kelompok-kelompok pengakuan agama memperoleh 12 kursi. Dari partai-partai murni politik, Partai Kedaulatan Rakyat memperoleh 4 kursi, diikuti

---

<sup>16</sup> Kementrian Penerangan. *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*. (Indonesia: Kementrian Penerangan, 1953), hlm. 515.

<sup>17</sup> Kementerian Penerangan, *Kepartaian dan Parleментарia*, hlm. 14.

<sup>18</sup> George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. (Jakarta: Sinar Harapan dan Sebelas Maret University Press, 1995), hlm.194.

oleh Lembaga Indonesia Maluku dengan 2 kursi, Lembaga Indonesia Sulawesi Selatan dengan 2 kursi, Parindra, PIR, PSI, Pemuda Demokrat dan Partai Buruh masing-masing dengan 1 kursi.<sup>19</sup>

Tidak hanya itu, setelah terbentuknya DPRD Kota Besar Makassar, DPRD mengusulkan kepada pemerintah pusat 4 calon walikota yang terdiri dari A.D. Sjahrudin dari Masyumi, Abd. Radjab Dg. Masikki dari Masyumi yang dicalonkan oleh Parindra dan LISS, Abdul Hamid Dg. Magassing dari PIR, dan H. A. Patoppoi dari Partai Buruh. Pemerintah pusat kemudian menetapkan Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar. Pada tanggal 30 juni 1952, Gubernur Sudiro atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Ahmad Dara Sjahrudin sebagai Walikota Makassar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam protokol Pelantikan kepala daerah nomor: A. 10/I/2 tanggal 4 Januari 1947.<sup>20</sup>

Setahun berselang, pada tahun 1953-1955 hampir setiap acara publik merupakan kesempatan untuk menyatukan kekuatan dalam mempertajam narasi-narasi ideologi pada masing-masing partai politik sebab pada saat itu merupakan periode kampanye pemilihan umum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> "Politieke Krachtsverhoudingen in Makassar", *Java Bode*, edisi 8 Februari 1952, hlm. 2.

<sup>20</sup> Kementrian Penerangan, *Op.Cit.*, hlm. 195.

<sup>21</sup> Herbert Feith, *The Indonesian Elections of 1955* (Ithaca: Cornell University, 1957), hlm. 9

Pergolakan politik semacam ini dapat dilihat ketika kelompok Isa Anshary yang merupakan salah satu petinggi Masyumi berbicara dengan nada-nada sensitif. Anshary memanfaatkan istilah kafir bagi lawan politik Masyumi. Ia bahkan mengeluarkan fatwa yang memerintahkan para pemimpin agama setempat untuk menolak pemakaman orang-orang Muslim Komunis.<sup>22</sup>

Perang urat saraf dalam politik yang ekstrim di Sulawesi Selatan/Tenggara ini merambat hingga tempat ibadah. Hal ini dapat kita saksikan pada salah satu khotbah Jumat tanggal 29 Oktober 1954 di Masjid Djami Pare-Pare. Seorang imam yang menyampaikan khotbah Jumatnya membahas ideologi komunis yang menurutnya sangat bertentangan dengan Ajaran Islam bahkan ia berkesimpulan bahwa:

“Orang-orang Islam jang masuk komunis (PKI) murtad, hukumnya haram, dan kalau mati tidak wajib disembahyangkan”.<sup>23</sup>

Hal ini menimbulkan reaksi keras dari Seksi Komite PKI Pare-Pare yang mengeluarkan surat terbuka tanggal 30 Oktober 1954 untuk menentang pernyataan khotbah tersebut. Reaksi PKI semakin tidak terbendung dengan menuntut pemerintah untuk mendirikan masjid baru bagi partai yang menjadikan tempat ibadah untuk tujuan yang

---

<sup>22</sup> *Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode*. Juli 9, 1955.

<sup>23</sup> Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960. No. Registrasi 713.

menyimpang. Oleh karena itu, PKI menghimbau rakyat untuk waspada terhadap lawan-lawan politik PKI yang akan membelokkan pertarungan politik kearah pertarungan ideologi.<sup>24</sup>

Pertarungan politik yang berlebihan ini berefek pada pertikaian diantara masyarakat. Hal ini dikarenakan intrik politik semacam ini mempunyai keterkaitan dengan aspek-aspek sosiologis yang dapat mempengaruhi emosional seseorang. Demonstrasi menentang Kartawinata menjadi salah satu contohnya. Sekitar 80.000 orang Islam, termasuk mahasiswa, ulama dan pekerja melakukan demonstrasi besar-besaran di Makassar sebagai bentuk protes terhadap pernyataan menghina Islam, Alquran dan Nabi Muhammad. Demonstrasi ini diselenggarakan oleh Panitia Pembela Islam di Makassar.<sup>25</sup>

Panggung politik semakin bergolak dengan munculnya gerakan gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dibawah pimpinan Kahar Muzakkar menambah jejak suram pesta demokrasi perdana di negeri ini. Velthoen dalam artikel yang berjudul "Memetakan Sulawesi Tahun 1950-an" berpendapat bahwa Sulawesi cukup sulit untuk

---

<sup>24</sup> Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960. No. Registrasi 714.

<sup>25</sup> "Demonstratie tegen Kartawinata", *Java-Bode.*, 4 Januari 1954, hlm. 1.



dipetakan. Hal ini dikarenakan terus berubahnya konstelasi perbatasan ketika perjuangan untuk otonomi dipengaruhi oleh konteks nasional, regional, dan lokal. Konstelasi etnis dan historis kemudian tergeser oleh pengaruh panji-panji Islam modernis yang diusung oleh Kahar Muzakkar.<sup>26</sup> Betapa tidak, gerombolan mengancam untuk menculik rakyat jika berani ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bagi mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut, gerombolan DI/TII telah menyiapkan dan menjatah dengan sejumlah peluru yakni sebutir peluru bagi orang yang ikut memberikan suaranya, dua belas butir peluru bagi Anggota Penyelenggara Pemilu, empat belas butir peluru untuk Anggota PPS (Penitia Pemungutan Suara), dan empat puluh peluru bagi Jawatan Penerangan.<sup>27</sup>

Berbeda dengan apa yang dialami oleh masyarakat di Kewedanan Soppeng, Kabupaten Bone. Mereka diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 40 kali jika menggunakan hak pilihnya. Pada hari pencoblosan sekitar ratusan orang yang ketahuan melanggar larangan tersebut digiring menuju lapangan untuk menjalani hukuman cambuk dengan

---

<sup>26</sup> Lihat Esther Velthoen "Memetakan Sulawesi Tahun 1950-an" dalam Sita Van Bemmelen dan Remco Reben (penyunting), *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2011, hlm 196-216.

<sup>27</sup> "Tuan Dapat Pelor Berapah?, DI/TII "Membagi2" Pelor Untuk Pemilihan Umum," *Marhaen*, 14 Maret 1955, hlm. 1.

menggunakan rotan sebanyak 40 kali.<sup>28</sup>

Partai Masyumi akhirnya berhasil memenangkan pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) pada bulan September dan Desember 1955.<sup>29</sup> Partai Masyumi di Sulawesi Selatan/Tenggara yang menjadi daerah pemilihan 12 berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no.7/1953 memperoleh suara dengan persentase mencapai 40%.<sup>30</sup> Kemenangan Partai Masyumi tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan/Tenggara dengan tingkat kemenangan tertinggi di Kabupaten Makassar, Kota Makassar, Bonthain, Bone, Pare-Pare, Mandar, dan Tenggara.

Setelah pesta demokrasi terlaksana, muncul gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta). Gerakan ini mendapat perhatian beberapa aliran politik khususnya di Sulawesi Selatan. Hal inilah yang menjadi batu sandungan

---

<sup>28</sup> "Rakjat di Soppeng Dipukul 40 Kali Kalau Turut Memberikan Suara", *Pedoman Rakjat*, 14 Oktober 1955, hlm. 1.

<sup>29</sup> Pemilu pertama adalah untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan pemilu kedua adalah untuk memilih wakil- wakil rakyat yang akan duduk dalam Majelis Konstituante dengan tugas menyusun suatu UUD yang permanen. Lihat, Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan 1993), hlm.165.

<sup>30</sup> Marwati Djoened Posponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 228.

bagi perkembangan partai Masyumi. Sebagai partai Islam, Masyumi sering mendapat tuduhan “membantu” gerakan ini. Melihat celah itu, PKI sebagai lawan terkuat Masyumi melancarkan strategi untuk menjatuhkannya dengan menuduh Natsir yang pada saat itu merupakan pimpinan tertinggi Partai Masyumi sebagai biang kerok Gerakan ini. Strategi tersebut untuk menjatuhkan tokoh-tokoh Islam di daerah-daerah termasuk di Sulawesi Selatan.<sup>31</sup>

Kedikdayaan Partai Masyumi pada pemilu tersebut akhirnya merosot dengan lahirnya gerakan PRRI/Permesta yang juga mempengaruhi perkembangan politik di Sulawesi Selatan. Gerakan ini berawal dari tuntutan berbagai elemen masyarakat yang menuntut pemberian otonomi kepada daerah. Ada kekecewaan daerah terhadap pusat yang berkenaan dengan konflik politik-ideologi di pusat, korupsi merajalela, dan kegagalan pembangunan ekonomi.<sup>32</sup> Ketegangan ini menyebabkan para perwira militer mencetuskan Permesta tanggal 2 Maret 1957, dengan terlebih dahulu mengumumkan daerah Sulawesi Selatan dalam keadaan darurat (SOB), sehingga diberlakukan

---

<sup>31</sup> Taufik Ahmad, “Mengail di Air Keruh: Gerakan PKI di Sulawesi Selatan 1950-1965”, *Patanjala*, Vol 6 No 2, Juni 2014, hlm. 306.

<sup>32</sup> Lihat R.Z. Leirissa, *Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. (Jakarta: Serambi, 1997), hlm. 11.

pemerintahan militer.<sup>33</sup>

Meningkatnya aktifitas PRRI/Permesta membawa dampak negatif bagi Partai Masyumi terutama di daerah-daerah yang bergolak. Bahkan Masyumi di daerah bergolak tersebut, dilarang melakukan aktifitas politik dengan keluarnya Peperpu/KSAD No. Prt/Peperpu/028/1958 tertanggal 5 September 1958 tentang larangan adanya organisasi Partai Masyumi, Parkindo, PSI dan IPKI di daerah-daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau Daratan serta Sulawesi Utara dan Tengah.<sup>34</sup> Keberadaan Masyumi semakin tidak jelas ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian yang tujuannya membatasi gerak partai. Bak gayung bersambut, Pimpinan Pusat Partai Masyumi menerima surat dari Direktur Kabinet No. 2730/TU/60 yang berbunyi:

“Paduka Yang Mulia Presiden telah berkenan memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan Keputusan Presiden Nomor 200/1960, bahwa Partai Masyumi harus dibubarkan. Dalam waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan ini, yaitu 17 Agustus 1960, Pimpinan Partai Masyumi harus menyatakan partainya bubar. Pembubaran itu harus diberitahukan kepada Presiden secepatnya. Kalau tida, Partai Masyumi akan diumumkan sebagai “Partai terlarang”.”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Taufik Ahmad. *Loc.Cit.*, hlm. 305

<sup>34</sup> *Antara*, 5 September 1958.

<sup>35</sup> Sabar Sitanggang, “Pembubaran Masyumi, PSI, dan HTI: Kisah Pulu di Hari Rabu”, *REPUBLIKA.co.id*. Jumat, 21 Juli 2017.

Tekanan terhadap partai semakin berat setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No 128 Tahun 1960 yang menyatakan, partai yang diakui pemerintah hanyalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), PSII, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), IPKI, Perti, dan Murba. Sementara Masyumi dan PSI bernasib sama dengan puluhan partai lainnya, tidak diakui dan dibubarkan. Keberadaan anggota Masyumi semakin terdesak dan tersudut, sampai akhirnya Partai Masyumi dibubarkan melalui Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 yang ditetapkan di Djakarta, 17 Agustus 1960.<sup>36</sup> Setelah kebebasan berdemokrasi yang dipertontonkan lima tahun sebelumnya, Partai Masyumi harus rela mengubur panji dan cita-cita politiknya. Dominasi kemenangan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan harus pudar hingga sirna bersama Keputusan Presiden tersebut.

## **1.2. Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang sejarah perjalanan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan sejak terbentuk pada akhir 1949 hingga dibubarkan pada 1960. Kajian ini akan lebih mudah dipahami jika dirumuskan dalam beberapa pertanyaan

---

<sup>36</sup> Keputusan Presiden ini menetapkan; PERTAMA: Membubarkan Partai Politik Masjumi, termasuk bagian-bagian/ tjabang-tjabang/ranting-rantingnja diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, Lihat Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960.

yang sekaligus menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peranan Partai Masyumi dalam penataan pemerintahan di Provinsi Sulawesi setelah kembali menjadi bagian NKRI?
2. Bagaimana strategi Partai Masyumi memenangkan Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan/Tenggara?
3. Mengapa Partai Masyumi dibubarkan meskipun memperoleh suara signifikan dalam pemilu pada 1960?

Kajian ini mengambil rentang waktu 1949-1960. Banyak hal yang dapat diungkapkan pada fase ini, diantaranya periode 1949-1952 merupakan awal pembentukan Masyumi di Sulawesi Selatan ditengah permasalahan hubungan pemerintah pusat dan daerah, permasalahan desentralisasi pemerintahan, persoalan seputar proses pengangkatan gubernur di Sulawesi, dan pemilihan DPRD Kota Besar Makassar. Periode berikutnya, 1953-1955 merupakan masa kampanye dan pemilihan umum ditengah pemberontakan Kahar Muzakkar. Periode terakhir yaitu 1955-1960 merupakan perjuangan Masyumi setelah menduduki parlemen yang banyak berkonflik dengan Presiden Soekarno yang mengakibatkan Masyumi dibubarkan.

Batasan ruang merupakan hal yang harus jelas dalam penulisan sejarah, penelitian ini akan mengkaji wilayah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan yang dimaksud dalam kajian ini adalah bekas Gabungan Selebes

Selatan atau Federasi Gabungan Daerah Sulawesi Selatan yang terbentuk pada masa NIT (Negara Indonesia Timur) tepatnya 28 Oktober 1948, kemudian dihapus pada tahun 1950. Tetapi sesudah itu meskipun secara administrasi tidak ada Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi nyatanya pada saat pemilu 1955 Sulawesi Selatan dan Tenggara menjadi satu daerah pemilihan, dan wilayahnya meliputi bekas Gabungan Selebes Selatan di masa NIT.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Studi ini membahas Partai Masyumi dalam pusran politik di Sulawesi Selatan dengan beragam variable, serta memperhatikan proses kronologisnya, yang bertujuan:

*Pertama*, menjelaskan peranan Partai Masyumi dalam penataan pemerintahan di Provinsi Sulawesi setelah kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hal itu, akan diurai perubahan tatanan pemerintahan, menyusun periodisasinya, dan menguraikan gerak sejarahnya. Penataan pemerintahan dilakukan baik sebagai realitas sejarah maupun sebagai konsep. Pembahasan akan berusaha memunculkan keunikan lokal dalam berbagai bentuk. Secara teoritis, hal ini penting dalam perdebatan terkini tentang penerapan *Trias Politica* dengan menggunakan produk hukum yang beragam. Penerapannya mengalami berbagai penyesuaian diwarnai dengan

kepentingan melalui panggung partai politik.

*Kedua*, secara metodologis, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejarah politik dengan perhatian aspek ideologis, kehidupan sosial budaya masyarakatnya dengan menggunakan metodologi sejarah serta didukung oleh ilmu-ilmu bantu. Penelitian ini akan memperhatikan dinamika kejayaan hingga kemunduran Partai Masyumi di Sulawesi Selatan dengan memperhatikan pusran politik dan kebijakan partai serta kehidupan sosial para pendukungnya.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan atas tujuan penulisan, kajian ini paling tidak akan memberi informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan politik tingkat lokal di Sulawesi Selatan tahun 1950-an. Secara historiografis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah referensi tentang studi sejarah politik secara utuh di Sulawesi Selatan. Yang tidak hanya patut untuk direnungkan dan dipahami, tetapi juga bijaksana untuk berdialog dengan masa lampau itu; membuka diri secara jujur dan penuh toleransi, sehingga kajian ini mencoba menampilkan kalau “sejarah selalu aktual”. Penelitian ini diharapkan pula menghadirkan perspektif alternatif sebagai bagian dari dokumentasi masa lalu yang akan menjadi bahan pembandingan dengan penelitian terdahulu dan menjadi langkah awal untuk studi yang lebih mendalam



pada masa yang akan datang.

#### **1.4. Tinjauan Pustaka**

Berbagai karangan telah ditulis untuk membicarakan partai politik di Indonesia namun sepengetahuan penulis, kajian tentang partai di Sulawesi Selatan masih menjadi kajian yang langka. Kajian yang mengkhususkan Partai Masyumi di Sulawesi Selatan itu sendiri. Meskipun demikian, membahas partai politik Indonesia tidak terlepas dari mengkaji keberadaan Masyumi, karena Partai Masyumi merupakan salah satu partai yang memiliki peran besar dalam perpolitikan di Indonesia setelah kemerdekaan hingga tahun 1960. Adapun beberapa tulisan yang membicarakan tentang keberadaan Masyumi adalah karya dari Artawijaya yang berjudul Belajar dari Partai Masyumi terbitan Pustaka Al-Kautsar. Buku ini mengupas bagaimana Partai Masyumi mengajarkan bahwa politik bukan semata-mata mengejar kekuasaan dan jabatan, tetapi lebih dari itu. Menurut Artawinata, Partai Masyumi memberikan teladan bahwa kekuatan partai politik sesungguhnya berada di akar rumput.

Buku ini ditulis seorang peneliti asal Prancis, Remy Madinier, terbit dalam bahasa Prancis dengan judul *L'Indonesie, entre Democratie Musulmane et Islam Integral, Histoire du Parti Masjumi (1945-1960)* dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerbit Mizan tahun 2013.

Sejarah Masjumi yang disajikan dalam buku ini, memperlihatkan bahwa Masjumi di satu sisi sangat akomodatif terhadap sistem demokrasi, disisi lain terus mengupayakan warna Islam dalam kehidupan bernegara seolah keduanya tidak bertentangan. Namun memilih model demokrasi parlementer dan multipartai, bahkan ketika pilihannya tinggal berhadapan dengan kediktatoran Soekarno.

Masyumi mewarisi struktur organisasi peninggalan Jepang yang diisi oleh organisasi massa Islam yang besar semacam NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya. Banyaknya organisasi yang tergabung dalam Masyumi tidak melahirkan kekayaan pandangan apalagi *rahmah*, tapi menjadi konflik internal yang menimbulkan perpecahan demi perpecahan. Persis seperti ungkapan Sjafruddin Prawiranegara, Masjumi seperti "*Seekor gajah yang mengidap beri-beri*". Atau seperti analisis George McT Kahin, bahwa Masjumi adalah "*Partai politik terbesar di Indonesia tapi kurang terorganisasi*"

Buku ini merupakan salah satu yang terlengkap dalam memotret sejarah Partai Masjumi (atau Partai Masyumi) yang ditulis peneliti luar Indonesia. Buku lain tentang Partai Masjumi yang sejauh ini cukup otoritatif adalah buku Deliar Noer berjudul "*Partai Islam di Pentas Nasional*"<sup>37</sup> yang berasal dari Tesis untuk meraih gelar Master di Cornell

---

<sup>37</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Pustaka

University, yang secara khusus membahas kiprah Partai Masjumi, kemudian dikembangkan menjadi buku dengan tambahan kiprah partai-partai Islam lainnya. Fokus dari buku ini adalah bagaimana peranan partai Islam dalam perpolitikan di Indonesia sedangkan penelitian ini membahas dinamika politik yang melibatkan masyarakat Sulawesi Selatan secara langsung.

Selanjutnya, buku Herbert Feith yang berjudul *The Indonesian Elections of 1955* (1957).<sup>38</sup> Buku ini menjelaskan mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia pada pemilihan umum 1955 serta berargumen bahwa penting untuk melihat kondisi masyarakat Indonesia paska revolusi. Buku ini merupakan hasil pengamatan Feith ketika ia bertugas di Indonesia tahun 1951-1956. Feith menggunakan disiplin ilmu politik dan sosiologi dalam menjelaskan narasi penelitiannya sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Literatur kedua dari Feith adalah buku dengan judul *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia* (1962).<sup>39</sup> Buku Ini merupakan studi intensif tentang politik Indonesia dari kemerdekaan sampai pada bulan Maret 1957 yang

---

Utama Grafiti, 1987), hlm. 20-25.

<sup>38</sup> Herbert Feith, *The Indonesian Elections of 1955*, (Cornell University, 1957), hlm. 12

<sup>39</sup> Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), hlm. 103.

diakhiri oleh terbentuknya "demokrasi terpimpin" Presiden Soekarno.

Tidak hanya itu, B. J. Boland dalam bukunya yang berjudul *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*.<sup>40</sup> Buku ini menjelaskan bagaimana Islam menjadi sebuah tujuan utama untuk perjuangan negara Republik Indonesia. Boland juga menjelaskan secara rinci mengenai hubungan antara Islam sebagai agama negara yang dikemukakan oleh partai-partai Islam.

Sedangkan peran partai politik ditingkat lokal dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan lokal serta kiprah partai-partai tersebut di tingkat pusat. R. William Liddle dalam kajiannya menyimpulkan bahwa sejak pertengahan dekade 1950-an, kekuasaan partai di Indonesia sangat dipengaruhi unsur-unsur pluralisme dan primordial yang menjadi ciri partisipasi rakyat dalam kehidupan politik di Indonesia. Partai berlaku sebagai sarana artikulasi aspirasi-aspirasi lokal dalam kerangka dan sifatnya yang parokial (karena partai menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat dimana kesetiaan kesukuan dan keagamaan sangat kuat dan nasional (karena partai dan dukungan lokal terbesar juga kuat di tingkat nasional) dan rupanya memberikan, bersama-sama lembaga-lembaga legislatif lokal,

---

<sup>40</sup> B. J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (Springer Science & Business Media, 1982), hlm. 39

seperangkat struktur dalam mana rakyat dapat memulai mengorganisasikan masyarakat baru yang telah digoncangkan dari tambatan tradisional oleh dasawarsa-dasawarsa kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, dan Revolusi.<sup>41</sup>

Sebelum menjadi bagian dari NKRI, Sulawesi Selatan merupakan bagian dari Negara Indonesia Timur. Artikel Ilham Daeng Makkelo “Penataan Kota dan Masyarakat Perkotaan: Makassar sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950” yang diterbitkan oleh SASDAYA, *Gajah Mada Journal of Humanities*, Vol. 2, No. 1 (November 2017) memberikan gambaran awal bagaimana Makassar sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur. Ia berpendapat bahwa Makassar yang peran sebagai ibukota negara setidaknya meneruskan karakter kota ini yang kosmopolitan dan multi-etnis yang datang orang-orang dari luar daerah, khususnya dari daerah timur Indonesia. Sistem kekuasaan dan administrasi NIT adalah hasil negosiasi, tawar-menawar, akomodasi, dan kompromi. Hal itu memberi kedudukan untuk para pemimpin lokal yang tersebar di Indonesia Timur. Anggota parlemen ketika pertama kali dibentuk beranggotakan para raja-raja lokal yang memiliki kekuasaan tradisional secara turun temurun. Menarik untuk melihat kekuatan raja-

---

<sup>41</sup> R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, (terj.) Nung Katjasungkana (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 2-3.

raja lokal ini pada pemilu 1955, sebab kebanyakan tidak terpilih. Artikel kedua dari Makkelo adalah Artikel yang diterbitkan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Volume 1 No. 2 (Maret 2018) dengan judul “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-20”. Tulisan ini memuat tentang beberapa kebijakan penting pada periode NIT yang menandai penataan dan pengaturan kota. Kebijakan yang dimaksud adalah penetapan Presiden NIT tentang pembentukan kota yang memuat ketentuan tentang pembangunan dan penatan sebuah kota. Semangat kebijakan ini yakni sebuah kota berotonomi penuh yang tentu saja mendukung penulis untuk menelusuri lebih jauh bagaimana Ibukota memainkan perannya dalam dinamika politik Partai Masyumi yang menjadi fokus kajian penulis.

Untuk melihat lebih jauh tentang NIT, Barbara Sillars Harvey melalui tulisannya “Sulawesi Selatan: Boneka dan Patriot” dalam Audrey R. Kahin. Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan yang diterbitkan di Jakarta oleh PT. Pustaka Utama Grafiti pada tahun 1989 melihat revolusi di Sulawesi Selatan melahirkan dua kategori kelompok politik yang berbeda yaitu boneka dan patriot. Yang ia maksud Boneka adalah mereka yang proBelanda yang menguasai wilayah kota Makassar, sedangkan patriot adalah mereka yang menentang kembalinya kekuasaan Belanda, mereka ini yang berada di wilayah pedalaman.

Hanya saja Harvey tidak melihat adanya dikotomi politik antara kelompok bangsawan dengan non bangsawan di masa revolusi. Dengan kata lain ia tidak melihat revolusi melahirkan pro-kontra berdasarkan stratifikasi sosial, akan tetapi berdasarkan garis geografis kota dan pedalaman. Namun yang terpenting dari apa yang diamati oleh keduanya adalah bahwa pengalaman revolusi baik di pedalaman maupun di kota banyak mempengaruhi perjalanan politik lokal di Sulawesi Selatan pada periode selanjutnya khususnya periode 1950-an.

Sedangkan untuk melihat percaturan politik J.R. Chaniago dalam Disertasinya yang berjudul "Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin Lokal dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur 1950" Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002 melihat ada dua kategori kelompok politik yang saling bersaing memperebutkan "kekuasaan" di Sulawesi Selatan di masa revolusi. Kelompok Pertama adalah kelompok yang pro terhadap kekuasaan Belanda. Termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian para raja dan kerabat bangsawannya, pejabat pemerintah NICA/kerajaan beserta pegawai-pegawainya, para anggota KL/KNIL/Polisi, dan sejumlah orang anti republik yang berpihak pada Belanda. Kelompok kedua adalah kelompok pendukung republik, baik yang berada di pedalaman maupun di perkotaan. Sebagian dari mereka yang berada di perkotaan

terbagi dalam kelompok-kelompok, seperti pemimpin organisasi sosial politik, para anggota pemerintahan dan parlemen NIT (Negara Indonesia Timur) yang pro republik. Selain itu, Chaniago juga berpendapat bahwa revolusi memberikan kewenangan baru kepada golongan rakyat biasa melebihi kewenangan dan penghormatan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh para bangsawan.

Sedangkan buku Kementrian Penerangan Republik Indonesi, Provinsi Sulawesi memberikan gambaran awal tentang kondisi sosial-politik di Sulawesi pada tahun 1950-an. Buku ini merupakan buku pegangan sebagai dasar untuk melihat Provinsi Sulawesi beserta perkembangan dan perjuangannya. Buku ini sangat berguna bagi penulis untuk menelusuri lebih jauh situasi politik yang terjadi di Sulawesi setelah menjadi bagian dari NKRI.

Selanjutnya buku Sita Van Bemmelen dan Remco Reben (penyunting), merupakan kumpulan artikel yang disatukan dengan judul *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*, yang diterbitkan di Jakarta oleh Yayasan Obor Indonesia pada tahun 2011. Penulis pertama yang membahas tentang Sulawesi pada tahun 1950 adalah Esther Velthoen dalam artikel yang berjudul "Memetakan Sulawesi Tahun 1950-an" berpendapat bahwa Sulawesi cukup sulit untuk dipetakan dan ditetapkan perbatasan daerah-daerahnya. Hal ini dikarenakan terus



berubahnya konstelasi perbatasan ketika perjuangan untuk otonomi dipengaruhi oleh konteks nasional, regional, dan lokal. Artikel selanjutnya masih bicara mengenai suasana politik di Sulawesi pada tahun 1950-an dalam buku ini adalah Diks Pasande yang bercerita mengenai "Politik Nasional dan Penguasa Lokal di Tana Toraja". Diks Pasande menuliskan betapa beratnya perjuangan Tana Toraja untuk membebaskan diri dari dominasi Bugis yang direpresentasikan oleh Andi Sose, yang juga dari Luwu dan telah menjadikannya daerah taklukan di masa lalu. Masyarakat Tana Toraja sejatinya memiliki tujuan utama untuk menempatkan daerah Tana Toraja sejajar dengan daerah-daerah lain. Mencakup pula di dalamnya otonomi daerah Tana Toraja, pemerintah yang dipimpin oleh anak daerah serta militer yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab pada Jakarta. Kehadiran Andi Sose dipandang sebagai penghalang usaha itu, sedangkan Andi Sose adalah seorang perwira militer yang ditugaskan di Tana Toraja bermaksud untuk menguasai kekayaan alam di daerah tersebut.

Adapun karya Barbara Sillars Harvey dalam bukunya Pemberontakan Kahar Muzakkar: *Dari Tradisi ke DI/TII* mencoba mengungkap secara analitis dan komprehensif latar belakang pemberontakan di Sulawesi Selatan pada tahun 1950-1965. Menurut Harvey pemberontakan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh

kerumitan masalah politis, tetapi juga menjangkau masalah sejarah, tradisi, dan agama. Kahar Muzakkar dalam kaitan ini hanya merupakan salah satu “produk” dari kerumitan itu. Permasalahan yang berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini pemerintah pusat enggan memberi otonomi yang lebih luas kepada daerah juga menjadi perhatian Harvey. Karya selanjutnya dari Harvey, *Permesta Pemberontakan Setengah Hati* dengan kajian politik, ia mencoba menelusuri peristiwa Permesta dengan memakai teori “*Center Periphery*”. Teori ini berusaha melihat faktor lemahnya integrasi birokratis dan ekonomis yang merupakan warisan dari kondisi umum zaman penjajahan, menjadi unsur pokok yang menimbulkan ketegangan pusat dengan daerah.

Resferensi berikutnya untuk melihat pemilu di Sulawesi Selatan, tesis Burhaman Djunedding pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2010. Dalam tulisannya, Burhaman mengurai pemilu 1955 memperlihatkan perubahan mendasar dalam dinamika politik lokal di Sulawesi Selatan. Hal itu tercermin dari hasil pemilu yang memperlihatkan betapa kurangnya dukungan “klien” (pemilih) terhadap “patron” (bangsawan). Dengan demikian menurut Burhaman pendapat yang mengatakan bahwa kemenangan Masyumi pada pemilu 1955 di Sulawesi Selatan dan

Tenggara karena kuatnya kelompok aristokrat tidak dapat dipertahankan.

Tulisan Taufik Ahmad, "Mengail di Air Keruh: Gerakan PKI di Sulawesi Selatan 1950-1965" pada jurnal *Patanjala*, Vol 6 No 2 yang terbit pada bulan Juni 2014 menambah keragaman sudut pandang terhadap politik identitas di Sulawesi Selatan. Taufik Ahamad dalam tulisannya melihat bagaimana hubungan PKI dengan kelompok politik lainnya termasuk Masyumi saling memberikan pengaruh dalam dinamika hubungan kekuasaan ditengah perpolitikan di Sulawesi Selatan yang dipengaruhi oleh gerakan DI/TII dan Permesta. Menurutnya dibalik kegagalan PKI menarik simpati masyarakat pada pemilu 1955, namun setelah DI/TII ditumpaskan PKI berhasil menjadikan Sulawesi Selatan sebagai basis di luar Jawa.

Tesis Idwar Anwar, (2021) "*Berebut Suara di Daerah Konflik: Stratetgi Partai Politik pada Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan/Tenggara*" memperkaya gambaran penulis tentang rekam jejak Partai Masyumi di Sulawesi Selatan. Dalam kajiaan Anwar mengungkapkan bahwa Parta Masyumi dan partai lain yang berhasil menempatkan wakilnya di parlemen mengusung strategi yang baik guna merebut simpati pemilih. Partai pemenang pemilu yang mampu merebut kursi parlemen melalui pengelolaan isu dengan mepertajam masing-masing ideologi partainya,

begitupun dengan penempatan caleg potensial, serta struktur partai terbangun hingga pelosok

Berbeda dengan tulisan-tulisan yang telah dipaparkan di atas, maka tulisan ini berusaha mengkaji perkembangan politik di Sulawesi Selatan dengan melakukan analisis historis terhadap pergerakan politik Masyumi 1945-1960. Penelitian ini dimaksud untuk mengisi gap dalam panggung sejarah politik di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Untuk membedakan penelitian sejarah dengan penelitian politik, tentu saja pada analisis pada aspek kesejarahannya yaitu masalah kelangsungan, perubahan dan kesinambungan.

### **1.5. Landasan Konseptual dan Pendekatan**

Setiap peristiwa yang ditulis oleh para sejarawan menceritakan sejarah itu sendiri dalam artian bahwa zaman memiliki masa dan memorinya sendiri. Manusia dalam hal ini hanya mampu merekonstruksi dan mengulanginya kembali dalam penulisan atau deskripsi sejarah. Peter Burke dalam *History and Social Theory* menyatakan bahwa sejarah lebih baik didefinisikan sebagai suatu studi tentang manusia dan semua pluralitasnya yang menekankan pada perbedaan-perbedaan dalam tempat dan rentang waktu tertentu. Dalam sebuah study tentunya dibutuhkan pendekatan-pendekatan ataupun pandangan tertentu dalam

penyelesaiannya.<sup>42</sup>

Partai Masyumi di Sulawesi Selatan yang menjadi objek kajian ini merupakan suatu kajian sejarah politik tingkat lokal juga membutuhkan pendekatan-pendekatan konseptual tertentu dalam penulisannya. Telah banyak peneliti terdahulu menggunakan pendekatan konseptual sejarah politik ini sebelumnya. Kuntowijoyo misalnya mengemukakan bahwa sejarah politik tingkat-lokal adalah peristiwa-peristiwa nasional yang menjadi bagian dari peristiwa lokal, bukan sebaliknya peristiwa lokal yang tetap lokal.<sup>43</sup> Definisi ini memberi pemahaman akan perbedaan politik tingkat lokal dengan politik lokal. Jika politik tingkat lokal adalah kepanjangan dari peristiwa-peristiwa nasional, maka sebaliknya politik lokal adalah peristiwa-peristiwa lokal berhenti di tempat itu tanpa ada kaitannya dengan peristiwa nasional.<sup>44</sup> Jadi yang membedakan kedua konsep tersebut adalah ruang lingkup permasalahannya.

Jika Kuntowijoyo dengan cermat membedakan politik tingkat lokal dengan politik lokal, maka berbeda dengan Sartono Kartodirdjo tampaknya tidak melihat perbedaan tersebut, bahkan beliau cenderung

---

<sup>42</sup> Peter Burke, *History and Social Theory*, (Cambridge: Polity Press, 1992), hlm. 2.

<sup>43</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), hlm. 186.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm.

menggunakan kedua konsep itu secara bersamaan seolah-olah keduanya tidak memiliki perbedaan yang substansial. Kendati demikian, kedua sejarawan ini sepakat pada satu pemahaman umum bahwa sejarah politik tidak lagi semata-mata menulis mengenai politik, tetapi tentang kekuasaan secara umum.<sup>45</sup> Keduanya memahami bahwa proses politik sangat ditentukan oleh sikap dan kelakuan politik yang pada hakekatnya bersifat multidimensional yang mencakup faktor ekonomi, sosial kultural, religi dan sebagainya.<sup>46</sup>

Selanjutnya Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa politik sebagai sebuah proses kompleks yang berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan pengikut, otoritas dan ideologi, ideologi dan mobilisasi, solidaritas dan loyalitas. Kesemuanya akan mampu mengungkap pola distribusi pengaruh dan kekuasaan (*polity*) dalam kaitannya dengan pola distribusi komoditi (*economy*) serta dengan *society* sendiri (pola distribusi hubungan sosial). Kesemuanya itu didasarkan atas *culture* (pola distribusi nilai-nilai).<sup>47</sup>

Sejalan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>46</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 47; Kuntowijoyo, *Op.Cit.*, hlm. 174.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

(NKRI) maka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat Anak Agung Gede Agung yang waktu itu masih mempunyai tugas untuk menyelenggarakan penyusunan pemerintah di daerah-daerah dengan mengangkat B.W. Lopian sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi sejak tanggal 15 Agustus 1950. Perhatian yang utama dititik beratkan pada pembentukan DPRD di seluruh Provinsi Sulawesi sesuai dengan program Kabinet negara kesatuan yang mendahulukan pemilihan umum (pemilu).<sup>48</sup>

Pemilu sebagai suatu proses politik merupakan peristiwa sejarah yang menarik, mengingat Indonesia pada saat itu merupakan “negara baru” tetapi mampu melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem politiknya. Bagaimana proses perubahan-perubahan itu terjadi di tingkat lokal tentu saja dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilu di tingkat lokal. Maswadi Rauf menguraikan bahwa hampir semua “negara baru” bekas jajahan negara-negara Barat ingin membentuk negara modern, sebagaimana negara Barat yang menggunakan instrumen-instrumen demokrasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila mayoritas “negara-negara baru” melakukan perubahan sosial yang rumit dan besar-besaran dengan meninggalkan masyarakat tradisional dengan nilai-nilai tradisional yang sedang mereka anut selama beratus-ratus

---

<sup>48</sup> Kementrian Penerangan, *Op.Cit.*, hlm. 177.

tahun lamanya.<sup>49</sup> Inilah yang menyebabkan mengapa modernisasi sangat sering digunakan untuk menjelaskan perubahan sosial yang terjadi. Elit politik di negara baru bersedia mengorbankan nilai-nilai lama yang mereka miliki selama ini dan menggantikannya dengan nilai-nilai baru yang berasal dari Barat.<sup>50</sup>

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Suhartono dkk melihat bahwa konsep demokrasi sebagai kritik alternatif dari sistem pemerintahan lama yang berbasis feodal ke pemerintahan baru yang bersifat modern. Dalam sistem lama, pemerintah adalah urusan para raja, bangsawan atau segolongan elit yang dekat dengan para raja. Sebaliknya, sistem pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat pada posisi terhormat sebagai pemilik kedaulatan. Sebuah negara dengan sistem pemerintahan modern yang demokratis, setidaknya memperlihatkan ciri pemerintahan dibawah kontrol nyata masyarakat. Instrumen utama yang dapat melahirkan sistem pemerintahan yang demikian, menurut Suhartono, dkk adalah melalui proses penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan non diskriminatif.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 59-60.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>51</sup> Suhartono, dkk. *Parlemen Desa: Dinamika DPR Kalurahan dan*



Ichlasul Amal, lebih jauh memahami bahwa pemilihan umum adalah prosedur yang diatur melalui organisasi (negara) dengan seluruh atau sebagian anggota organisasi tersebut memilih sejumlah orang untuk menduduki jabatan dalam organisasi itu. Amal lebih lanjut menguraikan bahwa pemilihan umum berfungsi sebagai prosedur untuk memberikan legitimasi atau mengabsahkan penugasan seseorang pada jabatan tertentu dalam pemerintahan. Aspek terpenting dari pemilihan adalah “partisipasi individu” dalam memberikan “otoritas absah” (*legitimate authority*) kepada mereka yang terpilih.<sup>52</sup>

Menarik kemudian untuk melihat “benang merah” antara peran partai-partai di tingkat lokal dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan lokal serta kiprah partai-partai tersebut di tingkat pusat. R. William Liddle dalam kajiannya menyimpulkan bahwa sejak pertengahan dekade 1950-an, kekuasaan partai di Indonesia sangat dipengaruhi unsur-unsur pluralisme dan primordial yang menjadi ciri partisipasi rakyat dalam kehidupan politik di Indonesia.<sup>53</sup>

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Clifford Geertz, berdasarkan

---

*DPRK Gotong Royong* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), hlm. 5.

<sup>52</sup> Ichlasul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1988), hlm. xix.

<sup>53</sup> R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, (terj.) Nung Katjasungkana (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 2-3.

apa yang diamatinya ia mengemukakan bahwa hampir semua “negara baru”, pascakolonialisme di Asia Tenggara dan Afrika menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan sentimen-sentimen primordial. Hanya saja wujudnya berbeda-beda. Indonesia sebagai negara baru menurut Geertz rentan dengan sentimen-sentimen primordial seperti regionalisme, agama dan adat-istiadat kemudian hal ini menjadi pemicu utama munculnya pertentangan-pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>54</sup> Sentimen-sentimen primordial menjadi nyata ketika pemilihan umum 1955 diselenggarakan, Geertz selanjutnya mengatakan bahwa pemilihan umum tahun 1955-lah melingkupi garis-garis besar umum sistem parlementer, mau tidak mau menjadi jelaslah bagi orang-orang Indonesia yang reflektif bahwa mereka harus menemukan cara tertentu untuk memecahkan masalah-masalah mereka di dalam kerangka kerja tatanan sipil modern yang hampir enggan mereka bangun. Mesti diharapkan menjernihkan suasana, pemilihan umum itu hanya mengeruhkannya.<sup>55</sup>

Selanjutnya Bambang Purwanto memahami munculnya sentimen-sentimen primordial di “negara baru” seperti Indonesia sebagai wujud dari gagalnya negara menciptakan identitas kebangsaan. Rangkaian

---

<sup>54</sup> Clifford Geertz, *Politik Kebudayaan*, (terj.) Francisco Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 102

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1950-an dipahami oleh Bambang Purwanto sebagai proses pembentukan identitas Indonesia yang gagal, masih terus berproses dan belum berakhir. Tetapi, pada sisi lain kesadaran akan identitas etnik di berbagai wilayah di Indonesia semakin menguat.<sup>56</sup>

Sejauh mana unsur-unsur primordialisme atau kuatnya kesadaran etnik tersebut tercermin pada pemilu 1955 di tingkat lokal. Hal tersebut menjadi penting untuk dilihat mengingat Sulawesi Selatan pada periode 1950-an merupakan daerah yang “bergolak” tentu saja menarik untuk melihat sejauh unsur-unsur primordialisme atau menguatnya kesadaran etnik nampak terlihat dari hasil-hasil pemilihan umum 1955 di daerah ini.

Proses politik sebagai kompleksitas hubungan antara pemimpin dan pengikut, otoritas dan ideologi, ideologi dan mobilitas, solidaritas dan loyalitas dan sebagainya. Kesemuanya akan mampu mengungkapkan pola distribusi pengaruh dan kekuasaan yang didasarkan atas kultur.<sup>57</sup> Berbagai kombinasi historis yang konkrit dari berbagai variable yang telah disebut terlebih dahulu itu memberi dampak yang konkrit terhadap perkembangan politik di Sulawesi Selatan. analisa seperti itu penting

---

<sup>56</sup> Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?* (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 165-166.

<sup>57</sup> Mukhlis Paeni dan Kathrin Robinson, *Politik Kekuasaan dan Kepemimpinan di Pedesaan* (Ujung Pandang: Lepas, 1987), hlm. 24.

artinya untuk memahami dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

Dalam memahami politik tingkat lokal Sulawesi Selatan periode 1950-an, maka akan dicoba dengan menggunakan pendekatan politik. Dalam pendekatan ini, aspek-aspek yang menjadi sorotan adalah kekuasaan, jenis kepemimpinan dan konflik yang terjadi.<sup>58</sup> Pendekatan tersebut akan dipadukan dengan pendekatan interaksionisme simbolis dengan tujuan menginterpretasi fenomena politik dalam arena politik tertentu.<sup>59</sup> Kedua pendekatan tersebut merupakan pelengkap analisa proses yang nantinya membedakan rentetan perkembangan menurut tahapan setiap dinamika yang terjadi dalam batang tubuh Partai Masyumi di Sulawesi Selatan.

#### **1.6. Sumber Penulisan dan Metode Penelitian**

Pokok bahasan yang dikaji disini adalah peristiwa sejarah masa lalu, khususnya sejarah yang berhubungan dengan pergolakan politik panji bulan bintang Partai Masyumi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan digunakan metode historis. Metode historis (sejarah) adalah penelaahan dokumen serta sumber-sumber lain yang

---

<sup>58</sup> Sartono Kartodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

dilaksanakan secara sistematis.<sup>60</sup> Dapat juga dikatakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>61</sup> Penulis mengumpulkan data dan informasi yang terdiri dari buku-buku, majalah, koran, naskah, jurnal yang ada relevansinya terhadap kajian tesis ini.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian ini mengacu pada pendapat Hamer Carey Hockett, yaitu mencari sumber yang layak untuk penelitian. Tahap awal dalam penelitian ini adalah menemukan dan mengumpulkan sumber data dan informasi. Penelusuran sumber data yang dimaksud antara lain Arsip Partai Masyumi (sebagai data primer) dan koran yang memberitakan situasi dan kondisi politik sesuai dengan batasan waktu penulis dan artikel-artikel yang menunjang masalah yang dibahas. Setelah penulis melakukan penelitian lebih lanjut, penulis mendapatkan arsip mengenai perpolitikan di Sulawesi Selatan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung kajian ini, antara lain: Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara (Sulselra),

---

<sup>60</sup> Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982), hlm. 332.

<sup>61</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: U.I. Press, 1986), hal. 18. Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama, 1996), Bab II-XIV.

Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960, Inventaris Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi 1950-1960.

Selain itu, penulis melakukan pencarian sumber-sumber melalui koran. Pertama, surat kabar harian *Abadi* dan *Suara Masyumi* yang diterbitkan oleh partai Masyumi untuk menyuarakan agenda dan pandangan para elite-elite politiknya. Selain itu koran *Antara*, *Harian Kedauletan Rakyat*, *Indonesia Timur*, *Pedoman Rakyat*, *Marhaen*, *Nasional*, *Nusantara* dan *Rakyat Berdjoeang*, dibutuhkan peneliti untuk mengetahui perkembangan dan dinamika sosial-politik di Sulawesi Selatan dari hari ke hari sepanjang tahun 1950-an dan akan menjadi salah satu sumber primer kajian ini.

Tidak hanya itu, peneliti juga menggunakan sumber-sumber dari media online melalui internet seperti *delpher.nl*, *jstor.org*, *brillonline.com*, *icwa.org* serta *indoprogress.com*. Dari situs tersebut, penulis memperoleh koran dalam Bahasa Belanda dalam bentuk salinan digital seperti *Algemeen Handelsblad* yang merupakan surat kabar terbitan Belanda pada tahun 1828-1970. Penulis merujuk kepada surat kabar ini pada tahun 1953 karena menjelaskan bagaimana kondisi sosial politik Indonesia. Adapun *Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode* yakni surat kabar berbahasa Belanda di Indonesia, yang muncul di Bandung antara tahun 1896 sampai 1957. Penulis merujuk surat kabar ini untuk melihat

pertikaian diantara masyarakat Indonesia pada tahun 1954. Selanjutnya adalah surat kabar berbahasa Belanda, *De Nieuwsgier* yang terbit di Jakarta antara tahun 1945-1957. Surat kabar ini menjelaskan bagaimana perkembangan di kabinet pemerintahan republik.

Berikutnya adalah *Java Bode* (Utusan Jawa), surat kabar berbahasa Belanda yang berada di Jakarta pada tahun 1852-1958. Sebagai salah satu surat kabar tertua di Jakarta, *Java Bode* cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia dan Belanda. Menurut penulis, surat kabar ini secara detail menggambarkan kondisi atau peristiwa-peristiwa penting yang berada di masyarakat pada periode 1953-1957.

Setelah berbagai sumber didapatkan, kemudian melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian menguji tingkat kredibilitasnya dengan cara mempertanyakan kapan sumber itu dibuat, sehingga tidak keluar dan ruang lingkup waktu yang sedang dikaji; di mana sumber itu dibuat (lokasi); siapa yang membuat (pengarang); dan bahan apa sumber itu dibuat (analisis); apakah sumber itu dalam bentuk asli (otentik); nilai bukti apakah yang ada didalamnya (kredibilitas).

Dalam mencari sumber-sumber, penulis memastikan terlebih dahulu apakah sumber tersebut dapat dikatakan benar dan sesuai dengan kajian penelitian ini. Ketika terdapat ketidaksesuaian informasi

antara satu sumber dengan sumber yang lain, maka langkah yang ditempuh adalah membandingkan (konparasi) dengan sumber yang lain. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan, mengingat kondisi politik tahun 1950-an dimana koran yang diterbitkan pada periode tersebut umumnya memiliki misi politik dan ideologi tertentu.

Setelah kritik sumber dilakukan, barulah sampai pada tahap penulisan atau merangkai fakta yang telah didapatkan untuk dituangkan dalam suatu tulisan sejarah yang bersifat kritis.<sup>62</sup> Hasil deskripsi dirangkumkan dalam sebuah kajian penelitian.

Dengan menggunakan metode sejarah diusahakan agar setiap penulisan sejarah mengarah pada rekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu. Setiap peristiwa masa lalu dapat dihadirkan sebagaimana adanya, meskipun hal ini sangat sulit untuk dilakukan, bahkan oleh para penulis sejarah maupun para sejarawan. Meskipun demikian, otentisitas data tetap diperhatikan dalam memaparkan kembali perjalanan politik Partai Masyumi dari Provinsi Sulawesi hingga terpecah menjadi beberapa provinsi, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan.

---

<sup>62</sup> Hamer Carey Hockett, *Critical in Historical Research and Writing*, (New York: Mac Millan Company, t.t.), hal. 9; dan Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 18.



## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Tulisan ini dibagi dalam enam bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan tulisan ini. Uraian selanjutnya berkenaan dengan tujuan penelitian yang memuat alasan-alasan tentang tujuan penulisan tesis ini; tinjauan pustaka untuk mengetahui bahan dan Bagaimana tulisan ini dikaji oleh para penulis sebelumnya; kerangka konseptual guna lebih mengarah kepada penelitian yang dilakukan; kemudian metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Bagian terakhir bab ini ditutup dengan mengemukakan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat Sejarah terbentuknya Partai Masyumi. Pembahasan dalam bab ini juga mencakup tentang perjuangan Partai Masyumi mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang peran Partai Masyumi dalam penataan pemerintahan di Provinsi Sulawesi setelah kembali menjadi bagian dari NKRI. Pada bab ini akan membahas tiga poin penting sejarah terbentuknya Partai Masyumi di Sulawesi Selatan, peta kekuatan politik awal di Provinsi Sulawesi, serta awal kejayaan Masyumi di Sulawesi Selatan.

Bab keempat akan membahas tentang persiapan Masyumi menjelang pesta demokrasi di Sulawesi Selatan/Tenggara (daerah

pemilihan dua belas). Masyumi mempersiapkan pemilu dengan memanfaatkan semua potensi di internal partai melalui sejumlah program. Selanjutnya strategi kampanye politik di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan Tenggara.

Bab kelima menjelaskan puncak kejayaan Masyumi di Sulawesi Selatan dengan memenangkan pemilu dan menempatkan wakil-wakil terbaiknya di parlemen baik DPR maupun dewan konstituante. Selain itu, dalam bab ini juga akan mengurai kebijakan-kebijakan Partai Masyumi setelah menduduki parlemen dan bagaimana konflik yang terjadi baik di tubuh Masyumi maupun konflik dengan pemerintah hingga akhirnya Masyumi dibubarkan.

Bab keenam yaitu bab penutup, yang meliputi kesimpulan terhadap uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.